

Analisa persepsi penerima program BSPS Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Dian Wahyoni DF¹, Merry Thressia², Mulyadi³

^{1,2}Staf Pengajar Prodi Teknik Sipil Universitas Ekasakti Padang

³Staf Pengajar Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Correspondent email: dianwahyonidewifitri@unespadang.ac.id

Diterima: 10 April 2021 | Disetujui: 29 April 2021 | Diterbitkan: 30 April 2021

Abstract. *The state is responsible for protecting the entire Indonesian nation through the implementation of housing and settlement areas so that people are able to live and occupy decent and affordable houses in a healthy, safe, harmonious and sustainable environment throughout Indonesia. Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is carried out through activities to improve the quality of self-help houses and the construction of new self-help houses as well as incentives for the construction of new self-help houses in the form of infrastructure, facilities and public utilities. One of the areas targeted by the BSPS program is Nagari Bungo Pasang Salido. This study aims to 1). evaluate the results of the implementation of the BSPS Program and see the results of its achievements in terms of security and standard housing structures for beneficiaries, 2). improve the quality of basic research results and produce scientific publications in reputable international scientific journals. This research uses the direct method by distributing questionnaires to the recipients of the BSPS program assistance. The results of this research show that the study of the achievement of the BSPS program for the beneficiary community is very good, with a questionnaire result with a percentage of 100%. The study on the safety of beneficiaries in occupying a house that is suitable for habitation with the feasibility of a fairly good structure, where the average percentage is 76.5% consisting of 7 indicators with 6 indicators worth 100% and 1 indicator worth 35.7%. The results of the Achievement of the Standards for Habitable House Structures for the BSPS Program in Structure Development, the average result is 97.19% consisting of 14 indicators.*

Keywords: *self-help housing stimulant assistance; constructio; structure feasibility*

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya (Ratnasari, Anisa. 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah ditujukan bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)* berupa stimulant rumah swadaya. Sedangkan pada pasal 15 yang mengamanahkan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan untuk melakukan pembangunan rumah swadaya. Pada pasal 27 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyelenggaraan Program BSPS dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pada prinsipnya Program BSPS berupaya mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya (Modul, 2019). Program ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, sehingga dengan adanya Program BSPS ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga (Mamangkey, Anderson.2019). Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Untuk menghitung persentase dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat Program BSPS, dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{Angka Persentase (P)} = \frac{f_{\text{total}}}{n_{\text{total}}} \times 100\% \quad (1)$$

Dari sekian banyak desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Bungo Pasang Salido terpilih sebagai lokasi penelitian, dikarenakan di kenagarian ini paling banyak terdapat rumah tidak layak huni dibandingkan dengan desa dan kelurahan lain, dan berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan pada bulan Oktober 2019. Pelaksanaan Program BSPS atau Rehab Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan berdasarkan database perumahan yang direkap melalui data dari pemerintah nagari tentang jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat pada wilayah Nagari Bungo Pasang Salido yang berjumlah sebanyak 10.958 rumah. Dimana, Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2017 sampai 2019 telah melaksanakan Program BSPS atau yang lebih dikenal dengan rehab rumah tidak layak huni melalui Dinas Perkimtan sebanyak 3.879 rumah. Penanganan rehab rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bersamaan antara Pemerintah Pusat.

Bentuk bantuan untuk penerima Program BSPS adalah berupa pembuatan rumah baru, peningkatan kualitas rumah beserta sarana dan prasarana, utilitas berupa jalan lingkung, jalan setapak, saluran air hujan (drainase), sarana MCK umum, penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber jaringan listrik dan sarana sosial lainnya seperti balai warga dan lain-lain.

Dari profil Nagari Bungo Pasang Salido diperoleh luas wilayah 4.027,93 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.449 orang yang terdiri dari 1.257 KK merupakan wilayah yang menjadi sasaran Program BSPS yang berada di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Bungo Pasang Salido berbatasan sebelah utara dengan Nagari Salido, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Painan, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Salido, dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tambang. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk: 1). mengevaluasi hasil pelaksanaan Program BSPS dan melihat hasil pencapaiannya dalam segi keamanan dan standar struktur rumah layak huni penerima bantuan, 2). meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dari Program BSPS kepada masyarakat di Nagari Bungo Pasang Salido. Dalam pengumpulan data peneliti dibantu oleh fasilitator pendamping Program BSPS, relawan dan perangkat Nagari yang memiliki latar belakang pendidikan dan keteknikan yang telah terlatih sebelumnya. Untuk analisa data dalam penelitian ini adalah dengan mengolah data manual dengan bantuan program *microsoft excel* dan tampilan menggunakan diagram batang (*bar chart*) dan diagram donat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan masyarakat yang telah menerima bantuan dari Program BSPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan obersvasi lapangan bersama fasilitator Program BSPS dan relawan Nagari kepada masyarakat di Nagari Bungo Pasang Salido tentang persentase jawaban kusioner mengenai studi pencapaian kelayakan struktur Program BSPS untuk masyarakat penerima bantuan, dibagi atas 3 kelompok indikator pertanyaan yaitu:

1. Kefektifan Program BSPS

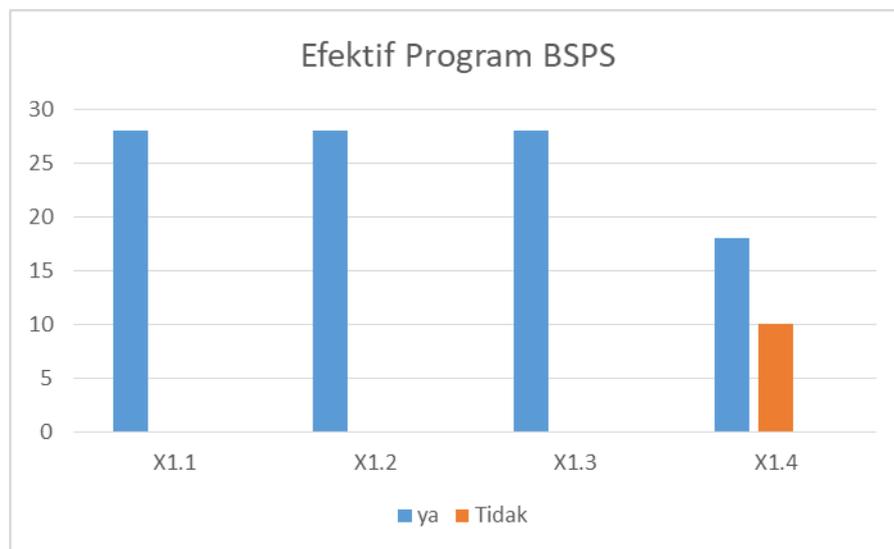
Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Pesisir Selatan sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat terutama yang memperoleh bantuan tersebut. Dengan adanya program dari pemerintah ini akan dapat memberi suatu motivasi dan harapan bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah* (MBR), sehingga mau dan berusaha sendiri dalam menciptakan kondisi rumah yang layak baik secara fisik, sosial, ekonomi dan kesehatan. Dalam pelaksanaan di lapangan diharapkan nantinya masyarakat dapat berswadaya dan bergotong-royong bersama masyarakat dalam meningkatkan kualitas RTLH.

Untuk mengetahui keefektifan Program BSPS, Program maka digunakan 4 indikator pertanyaan tentang Program BSPS, yakni:

Tabel 1. Keefektifan Program BSPS

No	Pertanyaan
X1.1	Apakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang disampaikan Tenaga Fasilitator Lapangan?
X1.2	Apakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah tepat sasaran?
X1.3	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah terealisasi dengan baik?
X1.4	Apakah Biaya bantuan sudah mencukupi?

Hasil dari ke-4 indikator di atas dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah, dimana pemanfaatan Program BSPS yang telah dinikmati oleh masyarakat sudah baik dan efektif walaupun ada 1 (satu) indikator yang menyatakan biaya belum mencukupi, karena upah tukang yang tidak ada dalam perencanaan Program BSPS dan bahan material yang tidak mencukupi. Untuk upah tukang dan material dalam Program BSPS diharapkan dari keswadayaan masyarakat penerima bantuan, seperti batu kali yang dapat diperoleh dari alam tanpa harus membeli ke toko bangunan.

**Gambar 1.** Grafik Efektifitas Program BSPS

2. Efisiensi dan Ketepatan Penerima Manfaat

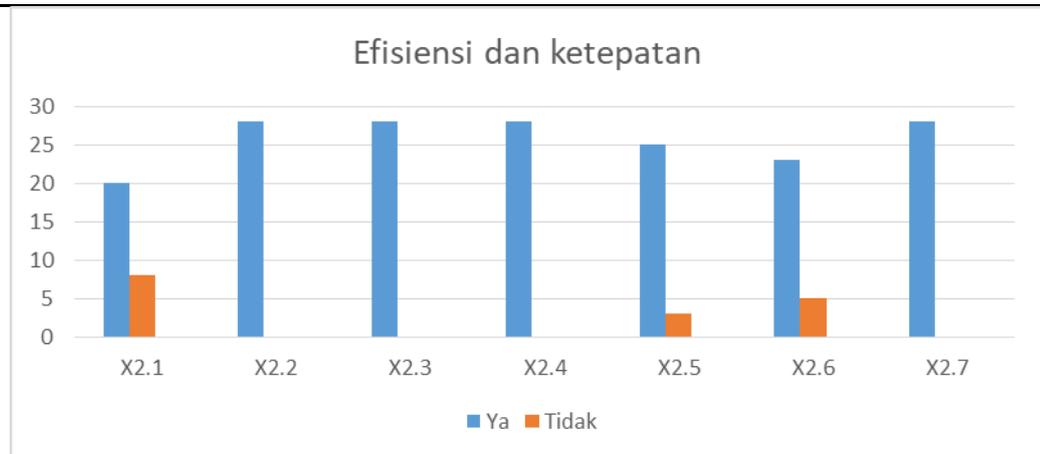
Para penerima bantuan BSPS itu adalah masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah tapi memiliki lahan untuk dibangun rumah. Selain itu belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni RTLH. Termasuk juga belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah. Bantuan pembangunan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang juga dialokasikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini ternyata mampu menjawab harapan masyarakat tidak mampu atau MBR dalam mendapatkan rumah yang layak. Bantuan stimulant perumahan Swadaya erat hubungannya dengan rumah layak huni yang selanjutnya disingkat RLH yang merupakan rumah yang telah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Untuk mengetahui efisiensi dan ketepatan penerima manfaat dari Program BSPS maka digunakan 7 indikator pertanyaan terkait dengan Program BSPS, yakni:

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Dan Ketepatan Penerima Manfaaar Dari Program BSPS

No	Pertanyaan
X2.1	Apakah Rumah yang diperbaiki sesuai dengan kriteria 7,2 m/orang?
X2.2	Apakah sudah menggunakan air bersih yang sehat.
X2.3	Apakah sudah mendapatkan utilitas jaringan listrik yang berfungsi
X2.4	Apakah struktur atap,dinding sudah aman?
X2.5	jalan lingkungan yang sudah diberi aspal atau beton?

- X2.6 Apakah saluran atau drainase lingkungan yang telah selesai dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan benar
- X2.7 Apakah penyediaan septitank atau tempat pembuangan sanitasi sudah berfungsi dengan baik



Gambar 2. Grafik Efisiensi dan Ketepatan Penerima Manfaat

Dari hasil Analisa grafik 2 di atas terlihat bahwa pada intinya program BSPS sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan tetapi dari sisi efisiensi dan kriteria ketepatan penerima manfaat ada beberapa indikator yang masih belum tercapai yaitu keluasaan standar ruang 7,2 m/orang, dimana masih dijumpai dalam 1 (satu) rumah, masih dijumpai 2 (dua) atau 3 (tiga) Kepala Keluarga sedangkan untuk prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan yang belum semuanya aspal atau beton dan saluran drainase yang belum semuanya teratasi dengan baik dengan terlihatnya sedimen yang masih tinggi dan rumput yang masih memenuhi saluran drainase.

3. Kelayakan Struktur

Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik dan layak, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, dan diharapkan akan tercapainya ketahanan keluarga. Untuk membuat sebuah rumah yang aman dan memenuhi kriteria layak huni harus mengikuti aturan dan petunjuk teknis dalam pembangunannya. Kualitas dan kelayakan bangunan harus meningkat. Jadi selain aman dan nyaman, juga layak untuk huni.

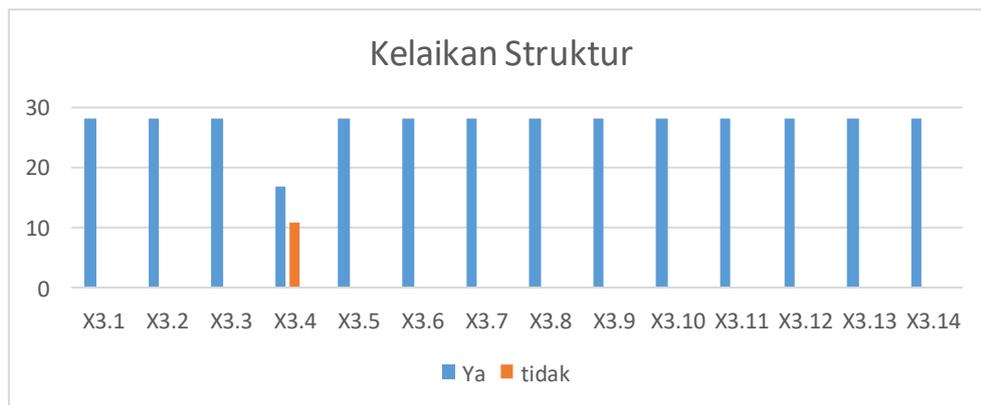
Dalam Program BSPS secara teknis pelaksanaannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang ditetapkan. Untuk menghindari penyimpangan dan pengurangan volume bahan bangunan, masyarakat diberikan Salinan RAB, Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) pada tahap 1 (satu) dan 2 (dua), sehingga masyarakat dapat melakukan evaluasi atau memeriksa langsung bahan bangunan yang mereka butuhkan untuk digunakan dalam rehab rumah.

Untuk penilaian kelayakan struktur yang dilaksanakan, maka digunakan kuisisioner kepada responden penerima manfaat dengan menggunakan 14 indikator pertanyaan terkait struktur pada Program BSPS, yakni:

Tabel 3. Kelayakan Struktur dari Program BSPS

No	Pertanyaan
X3.1	Apakah Bahan Bangunan yang diantar oleh toko sesuai dengan RAB?
X3.2	Apakah dalam pembangunan rumah menggunakan pondasi batu kali?
X3.3	Dalam pembuatan pondasi apakah menggunakan perbandingan 1:4 untuk semen dan pasir?
X3.4	Apakah batu kali yang digunakan batu belah?
X3.5	Apakah ada penggunaan slof ?
X3.6	Apakah Besi yang digunakan dalam pembuatan slof menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang?

X3.7	Perbandingan yang digunakan dalam pengecoran slof apakah menggunakan campuran 1:2:3 untuk semen, pasir dan kerikil?
X3.8	Apakah ada penggunaan kolom?
X3.9	Apakah Besi yang digunakan dalam pembuatan Kolom menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang?
X3.10	Perbandingan yang digunakan dalam pengecoran Kolom apakah menggunakan campuran 1:2:3 untuk semen, pasir dan kerikil?
X3.11	Apakah menggunakan balok ?
X3.12	Apakah Besi yang digunakan dalam pembuatan Balok menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang?
X3.13	Perbandingan yang digunakan dalam pengecoran Balok apakah menggunakan campuran 1:2:3 untuk semen, pasir dan kerikil?
X3.14	Apakah rangka kuda-kuda menggunakan kayu yang kondisinya layak?



Gambar 3. Grafik Kelayakan Struktur

Dari grafik 3 di atas, persentase jawaban dari penerima manfaat Program BPS terlihat bahwa pemahaman masyarakat Nagari Bungo Pasang Salido tentang studi pencapaian kelayakan struktur Program BPS sudah baik, dimana persentase jawaban dari 14 indikator sangat tinggi yakni 100%, sedangkan untuk 1 indikator memiliki persentase 60,7 % dibidang penggunaan pondasi batu kali yang seharusnya batu pecah tapi umumnya menggunakan batu kali utuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai penerima bantuan Program Stimulan Perumahan Swadaya di Nagari Bungo Pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat menempati rumah layak huni sesuai dengan kriteria Program BPS, yakni:

1. Kefektifan Program BPS sudah mencukupi 100% untuk sasaran penerima dan 35,7% bantuan dana belum mencukupi.
2. Efisiensi dan Ketepatan Program BPS sudah efisien dan tepat waktu ada beberapa kendala dibidang luasan rumah perkepala dan infrastruktur yang belum semua terbenahi
3. Kelayakan Struktur Program BPS sudah baik dibidang struktur hanya dalam penggunaan batu kali dalam pondasi yang tidak menggunakan batu pecah, yaitu sebesar 60,7%

Saran dari hasil penelitian ini adalah: 1) fasilitator lapangan Program BPS harus lebih mensosialisasikan isi Program BPS kepada penerima bantuan tentang standar rumah sederhana yang layak huni agar masyarakat paham akan pentingnya indikator rumah layak huni, 2) pemerintah lebih proaktif untuk menyalurkan program agar tepat sasaran, 3) untuk penelitian kedepan diharapkan lebih ditekankan dalam bentuk kebijakan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamangkey, Anderson. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurung Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sam Ratulangi
- Modul. (2019) Modul Pembelajaran Fasilitator, Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, (2018) PERMEN PUPR Nomor 07/PRT/2018. Tentang Stimulan Perumahan Swadaya.
- Profil Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- Ratnasari, Anisa. Dkk (2019). Penerapan Konsep Rumah Sehat Sederhana pada Bedah Rumah Warga di Desa Pakulonan Barat Tangerang, Tangerang: Studi Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Pradita
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman